PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT PERIODE ANGGARAN 2011-2015)

Oleh:
Vq Ocsaent Firstian
21113175

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung, Indonesia
e-mail: vqocsaent@gmail.com

ABSTRACT

Capital Expenditure influenced by several factors, such as Local Own Revenue (PAD) and Financing Surplus Budget (SiLPA). There is a phenomenon in several dicstricts in West Java Province which showed that Local Own Revenue and Financing Surplus Budget increased but not followed by the Capital Expenditure.

This study aimed to determine how much influence of Local Own Revenue to the Capital Expenditure and Financing Surplus Budget to the Capital Expenditure in the districts / cities in West Java province in 2011-2015 periods.

The sampling method used in this study is the purposive sampling method. The data is in the form of secondary data which has been obtained from the realization of Local Government Budget (APBD) reports of districts / cities in West Java province and the observation is in 2011-2015 periods that have been obtained from the Indonesian Statistics Agency (BPS) of West Java Province. The method used in this research is descriptive analysis and verification. Statistical tests used in the multiple regression analysis through the testing phase classical assumption test using SPSS software.

The results of this research show that Local Own Revenue (PAD) has positive and significant influence toward the capital expenditure, and Financing Surplus Budget also has positive and significant influence toward the capital expenditure. It indicates when PAD variables are getting high, so the allocation of Capital Expenditure is getting high as well. Likewise with the SiLPA's growth, that will increase the amount of Capital Expenditure.

Keywords: *Local Own Revenue, Financing Surplus Budget, Capital Expenditure*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era desentralisasi, setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai Belanja Daerahnya. Kejadian ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya (Erlina dan Rasdianto, 2013:83). Untuk itu masing-masing pemerintah daerah membuat gambaran mengenai apa yang diinginkan pemerintah daerah atau kota di masa yang akan datang. Sehingga rencana strategis (RENSTRA) memegang peranan dalam menentukan struktur dan arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana APBD mencakup segala aspek sumber pendanaan dan belanja daerah (Halim dan Kusufi, 2012:93).

Pada hakekatnya, Pemerintah Daerah memiliki kebebasan yang penuh dalam menentukan prioritas belanja yang dianggap penting oleh daerah. Dengan demikian merupakan suatu hal yang wajar apabila prioritas belanja antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda (Halim dan Kusufi, 2012:87). Maka untuk mendanai belanja daerah, pemerintah daerah juga harus berupaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Halim dan Kusufi, 2012:88). Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah dapat

dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat (Aries Djaenuri. 2012:24).

Selain dari PAD, dalam rangka membiayai kegiatannya Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Di mana SiLPA merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja (Albra dan Syukriy, 2013:69).

Dengan adanya peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah, diharapkan dapat meningkatkan anggaran Belanja Modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik (Halim dan Kusufi, 2012:118). Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, di beberapa daerah peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal karena pendapatan asli daerah banyak terpakai untuk belanja operasi lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertatrik untuk melakukan penelitian mengenai **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Jawa Barat Periode Anggaran 2011-2015)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.
2. Seberapa besar pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal dengan menggunakan data yang diperoleh dan diji empiris, guna memecahkan permasalahan yang terjadi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Instansi Pemerintah Daerah
   Dapat dijadikan informasi tambahan sekaligus dapat dijadikan masukan sabagai bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan - kebijakan dan strategi untuk meningkatkan PAD dan me*manage* SiLPA guna mengoptimalkan pengalokasian Belanja Modal.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Pengembangan Ilmu
   Hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya pada bidang Akuntansi Sektor Publik.
2. Bagi Pembaca
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengaruh PAD, SiLPA, dan belanja modal serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Abdul Hafidz Tanjung (2014:85), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada era reformasi keuangan daerah, bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar. Bentuk APBD terbaru terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim dan Kusufi, 2012:37).

2.1.1.1 Pendapatan Daerah

Indra Bastian (2012:146) menyatakan bahwa, "Pendapatan Daerah adalah peningkatan harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut".

Halim dan Kusufi (2012:96) mengelompokan pendapatan daerah menjadi 3, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.1.1.2 Belanja Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012:99), Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

Selanjutnya Halim dan Kusufi (2012:100) mengelompokan belanja daerah menjadi 4, yaitu:

1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga
4. Transfer

2.1.1.3 Pembiayaan

Menurut Abdul Hafidz Tanjung (2014:386), pembiayaan adalah pos keuangan yang berfungsi untuk menutupi defisit anggaran jika anggaran pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja atau menggunakan surplus anggaran jika anggaran pendapatan lebih besar dibandingkan anggaran belanja.

a. Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu (Halim dan Kusufi, 2012:111).

b. Penerimaan Pembiayaan

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa, "penerimaan pembiayaan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan". Kemudian Halim dan Kusufi (2012:111), mengklasifikasikan penerimaan pembiayaan terdiri atas jenis pembiayaan berikut ini:

1. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Penerimaan Pinjaman Daerah
4. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Piutang Daerah
6. Hasil Penjualan kekayaan daerah

c. Pengeluaran Pembiayaan

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa, "pengeluaran pembiayaan sebagai semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan". Kemudian Halim dan Kusufi (2012:111) mengelompokkan pengeluaran pembiayaan daerah ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)
3. Pembayaran Pokok Utang
4. Pemberian Pinjaman Daerah

2.1.1.4 Laporan Realisasi Anggaran (APBD)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode (APBD) dengan jumlah yang telah direalisasi di akhir periode (Indra Bastian, 2012:387). Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 menyatakan bahwa, "Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya".

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.2.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan menurut Aries Djaenuri (2012:88), Pendapatan Asli Daerah merupakan segala penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Aries Djaenuri (2012:88), Pendapatan Asli Daerah adalah hasil akumulasi dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hal tersebut serupa dengan yang diungkapkan oleh Halim dan Kusufi (2012:102) bahwa jumlah PAD dihitung dengan cara mengakumulasikan total pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dengan menggunakan formula:

Pajak daerah	
Retribusi daerah	
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
Lain-lain PAD yang sah	+
PAD	

Sumber : Halim dan Kusufi (2012:102)

2.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

2.1.3.1 Definisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Abdul Hafidz Tanjung (2014:91) menyatakan bahwa, "SiLPA adalah selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama satu periode pelaporan". Sedangkan menurut Mursyidi (2013:70), SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan (pendapatan daerah) dan pengeluaran (belanja daerah) selama satu periode anggaran.

2.1.3.2 Indikator Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Menurut Abdul Hafidz Tanjung (2014:91), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama satu periode pelaporan. Adapun rumusan perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah:

SiLPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto
Surplus/Defisit = Jumlah Pendapatan Daerah – Jumlah Belanja Daerah
Pembiayaan Neto = Jumlah Penerimaan Pembiayaan – Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Sumber : Abdul Hafidz Tanjung (2014 :99)

2.1.4 Belanja Modal

2.1.4.1 Definisi Belanja Modal

Halim dan Kusufi (2012:107) mengatakan bahwa, "Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi". Sedangkan menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121), Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap berwujud yang nilai assetnya sebesar harga beli/bangun ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.

2.1.4.2 Indikator Belanja Modal

Erlina dan Rasdianto (2013:121) memformulasikan total Belanja Modal sebagai berikut:

Belanja Modal = BM 1 + BM 2 + BM 3 + BM 4 + BM 5

Ket:
BM 1 = Tanah
BM 2 = Gedung dan Bangunan
BM 3 = Peralatan dan Mesin
BM 4 = Jalan, Irigasi dan Jaringan
BM 5 = Fisik Lainnya

Sumber: Erlina dan Rasdianto (2013:121)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.1.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Y. Sri Pudyatmoko (2009:67) menyatakan, "dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hasil Pendapatan Asli Daerah masuk ke bagian Pendapatan Daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk Belanja Daerah, termasuk Belanja Modal". Dapat diartikan bahwa jumlah Belanja Modal yang akan dilakukan oleh pemerintah didasari oleh jumlah PAD yang diterima oleh daerah yang bersangkutan.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mangowal (2013), Oviliza (2013), serta Wertianti dan Dwiranandra (2015) pun menyimpulkan hasil yang sama. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, maka Belanja Modal akan ikut meningkat.

2.2.2 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal

Kelebihan SiLPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal (Abdul Hafidz Tanjung, 2014:91). Dapat diartikan bahwa jumlah SiLPA akan mempengaruhi kuantitas Belanja Modal.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013), Simamora (2014), serta Sugiarthi dan Supadmi (2014) bahwa peningkatan SiLPA, akan mempengaruhi peningkatan Belanja Modal.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

2.3 Hipotesis

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal
H2: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan suatu pengetahuan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2013:38), Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Operasionalisasi variabel penelitian ini disajikan dalam tabel 3.1.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena data yang dikumpulkan telah diolah oleh pihak ketiga atau pihak lain. Data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011-2015, yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan *(Field Research)*
2. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

3.4 Populasi, Penarikan Sampel, Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013:80), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Jumlah yang dimaksudkan adalah sebanyak 27 kabupaten/kota x 5 periode anggaran = 135 Laporan Realisasi APBD.

3.4.2 Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili (Sugiyono, 2013:81).

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purpossive sampling*. Menurut Sugiyono (2013:85), *sampling purposive* adalah tektnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, di mana peneliti memiliki kriteria atau tujuan tertentu terhadap sampel yang akan diteliti. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini haruslah memenuhi suatu kriteria khusus. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 35 dan disajikan dalam tabel 3.2.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jl. PH. H Mustofa No. 43, Cibeunying Kaler Bandung.

3.4.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Februari 2017 sampai dengan Agustus 2017.

3.5. Metode Pengujian Data

Metode Pengujian data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode statistik analisis regresi linier berganda dan korelasi. Perhitungan dengan metode statistik tersebut menggunakan program Komputer Statistical Program for Social Science (SPSS).

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Hal ini dilakukan sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis. Beberapa asumsi klasik regresi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan analisis regresi berganda. Terdapat empat jenis pengujian pada uji asumsi klasik ini, diantaranya:

3.5.1.1 Uji Normalitas Data Residual

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal (Imam Ghozali, 2013:160). Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal (Husein Umar, 2013:181).

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.5.1.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2013:105), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Asumsi multikolonieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolonieritas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Deteksi ada tidaknya multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan toleransi. Model regresi dikatakan bebas dari multikolonieritas apabila nilai VIF < 10, dan *tolerance* > 0,1 (10%).

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2013:139), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas maka dilakukan uji *park gleyser*. Pada uji *park gleyser*, jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variable dependen maka, ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen maka, ada indikasi tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam pengujian *park gleyser* menggunakan koefisien signifikansi (probabilitas) pada tingkat ketelitian 5%. Jika sig >= 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Cara lain untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatter plot.* Deteksi terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot.* Dasar analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas atau di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi.

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi maka untuk persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi (Danang Sunyoto, 2013:97). Menurut Danang sunyoto (2013:98), salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2)
b) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 < DW < +2
c) Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW di atas +2 atau DW > +2

3.6 Metode Analisis

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif.

a. Analisis Deskriptif
   Menurut Sugiyono (2013:21), metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.
b. Analisis Verifikatif
   Menurut Sugiyono (2013:21), metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple*)

Menurut Umi Narimawati (2011:325), Analisis Regresi Linear Berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval.

Adapun penjelasan garis regresi menurut Husein Umar (2015:213), yaitu, “Garis regresi (*regression line*/*line of the best fit*/*estimating line*) adalah suatu garis yang ditarik diantara titik-titik (*scatter diagram*) sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan variabel yang lain, dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam korelasinya (positif atau negatifnya).”

Untuk menggunakan teknik analisis ini syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Data harus berskala interval;
b. Variabel bebas terdiri lebih dari dua variabel;
c. Variabel tergantung terdiri dari satu variabel;
d. Hubungan antara variabel bersifat linier. Artinya semua variabel bebas mempengaruhi variabel tergantung;
e. Tidak boleh terjadi multikolinieritas. Artinya sesama variabel bebas tidak boleh berkorelasi terlalu tinggi, misalnya 0,9 atau terlalu rendah misalnya 0,01;
f. Tidak boleh terjadi autokorelasi. Akan terjadi autokorelasi jika angka *Durbin dan Watson* sebesar < 1 atau > 3 dengan skala 1-4;
g. Jika ingin menguji keselarasan model (*goodness of fit*), maka dipergunakan simpangan baku kesalahan. Untuk kriterianya digunakan dengan melihat angka *Standard Error of Estimate* (SEE) dibandingkan dengan nilai simpangan baku (*Standard Deviation*). Jika angka *Standard Error of Estimate* (SEE) < simpangan baku (*Standard Deviation*) maka model dianggap selaras; dan
h. Kelayakan model regresi diukur dengan menggunakan nilai signifikansi. Model regresi layak dan dapat dipergunakan jika angka signifikansi < 0,05 (dengan presisi 5%) atau 0,01 (dengan presisi 1%).

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menerangkan besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal. Persamaan analisis regresi linier berganda secara umum untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Y=\beta_O+\beta 1X1+\beta 2X2+\varepsilon}$$

Sumber: Husein Umar (2015:213)

3.6.2 Analisis Korelasi *Pearson*

Besarnya pengaruh masing-masing komponen variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dapat diketahui dengan menggunakan korelasi *pearson*. Koefisien korelasi *pearson* antara masing-masing variabel independen tersebut dengan variabel dependen dapat dihitung sebagai berikut :

$$\mathbf{{}^{r}XY.Z = [{}^{r}XY - ({}^{r}XZ)\,(rYZ)\,] / [1-r^2XZ1 - r^2YZ]}$$

Sumber: Husein Umar (2015:231)

Ketentuan untuk melihat tingkat keeratan korelasi menggunakan acuan pada tabel 3.3.

3.6.4 Analisis Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) dapat diketahui dengan menggunakan analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya yaitu:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2011:50)

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi atau Seberapa Jauh Perubahan Variabel Dipergunakan oleh Variabel X

r^2 = Kuadrat Koefisien Korelasi

100% = Pengkali yang menyatakan dalam persentase

Dengan diketahuinya koefisien korelasi antara masing-masing (X_1) dan (X_2) terhadap (Y) kita bisa menentukan koefisien determinasi. Koefisien determinasi tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan masing-masing variabel bebas (X_1 dan X_2) terhadap variabel terikat (Y).

3.6.5 Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (Ho) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (Ha) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

3.6.5.1 Pengujian Secara Parsial (Uji – t Statistik)

Menghitung nilai thitung dengan mengetahui apakah variabel koefisien korelasi signifikan atau tidak dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2014:243)

Dimana:

t = thitung

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Untuk mengetahui ditolak atau tidaknya hipotesis penelitian, kaidah yang digunakan dalam pengujian terhadap hipotesis penelitian adalah kaidah pengujian:
Jika ^{t}hitung ≥ ^{t}tabel, maka tolak H_o artinya signifikan dan ^{t}hitung ≤ ^{t}tabel, maka terima H_o artinya tidak signifikan.

Nilai t tabel bisa ditemukan dengan bantuan tabel distribusi t *student* yang sudah tersedia secara umum, dengan ketentuan pencarian α = 0,05 dan derajat kebebasan atau df = (jumlah data/n-k-1).

3.6.5.2 Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut:

a. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_o ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X_1, X_2 dan variabel Y ada pengaruhnya;
b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_o ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X_1, X_2 dan variabel Y tidak ada pengaruhnya;
c. t_{hitung} : dicari dengan rumus perhitungan t_{hitung}; dan
d. t_{tabel}: dicari di dalam tabel distribusi t *student* dengan ketentuan sebagai berikut α = 0,05 dan df = (jumlah data/n-k-1).

3.6.5.3 Penarikan Kesimpulan Hipotesis

Daerah yang diarsir (gambar 3.1) merupakan daerah penolakan dan berlaku sebaliknya. Jika t hitung jatuh di daerah penolakan (penerimaan) maka Ho ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak). Artinya koefisien regresi signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mempengaruhi (tidak mempengaruhi) Belanja Modal. Tingkat signifikannya yaitu 5% (α = 0,05) artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) dengan taraf kepercayaan 95% maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya/tidak adanya pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut). Dalam hal ini ditunjukkan dengan penolakan Ho atau penerimaan alternatif (Ha).

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini akan memberikan gambaran mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Jawa Barat Periode Anggaran 2011-2015.

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada gambar 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Jawa Barat Periode Anggaran 2011-2015 secara keseluruhan mengalami peningkatan tiap tahunnya.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Pada gambar 4.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Daerah Jawa Barat Periode Anggaran 2011-2015 secara keseluruhan mengalami kenaikkan tiap tahunnya selama lima tahun berturut-turut.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Belanja Modal

Pada gambar 4.3 Belanja Modal secara keseluruhan mengalami peningkatan, hanya terjadi penurunan signifikan pada tahun 2015.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa model regresi memiliki nilai residual yang berdistribusi normal dengan nilai 0.764 di mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05.

Adapun hasil dari uji validitas dalam bentuk grafik yang disajikan dalam gambar 4.4. Dari Normal Q-Q plot tersebut dapat diketahui bahwa sebaran *unstandardized* residual mengikuti dan menyebar disekitar garis diagonal, maka dapat disimpulkan residu model persamaan regresi berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui nilai *tolerance* yang diperoleh untuk kedua variabel bebas adalah sebesar 0,895 > 0,10 dengan nilai *VIF* sebesar 1,117 < 10. Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel bebas dalam model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Pada Gambar 4.5 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

4) Uji Autokolerasi

Berdasarkan tabel 4.3 diatas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1.393 Karena nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 < 1.393 < +2, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

4.1.2.2 Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 1.311E11 + 0{,}382X_1 + 0{,}412X_2$$

Nilai yang tertera dalam persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 1.311E11; artinya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) nilainya adalah 0, maka Belanja Modal nilainya adalah 1.311E11.
b. Koefisien regresi variabel PAD (X_1) sebesar 0,382; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan PAD mengalami kenaikan 1%, maka Belanja Modal (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,382. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara PAD dengan Belanja Modal, semakin tinggi PAD maka Belanja Modal akan semakin tinggi.
c. Koefisien regresi variabel SiLPA (X_2) sebesar 0,412; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan SiLPA mengalami kenaikan 1%, maka Belanja Modal (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,412. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara SiLPA dengan Belanja Modal, semakin tinggi SiLPA maka Belanja Modal akan semakin tinggi.

4.1.2.3 Analisis Korelasi

- Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal
  Berdasarkan tabel 4.5, nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal adalah sebesar 0,686. Jika diinterprestasikan dalam kriteria, maka korelasi PAD terhadap Belanja Modal memiliki hubungan yang cukup tinggi.
- Hubungan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.5, nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan Belanja Modal adalah sebesar 0,658. Jika diinterprestasikan dalam kriteria, maka korelasi SiLPA dengan Belanja Modal memiliki hubungan yang cukup tinggi.

4.1.2.4 Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.5 maka diperoleh nilai koefisien determinasi parsial dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal sebesar 47%. Sedangkan nilai koefisien determinasi parsial dari variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal sebesar 43,2%.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis

a) Pengujian Hipotesis Pendapatan Asli daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.6, diketahui bahwa t_{hitung} untuk X_1 sebesar 5,021> nilai t_{tabel} 2,037, maka H_0 ditolak artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil *output* tersebut digambarkan dan telah disajikan pada gambar 4.6.

b) Pengujian Hipotesis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.7, diketahui bahwa t_{hitung} untuk X_2 sebesar 4,625> nilai t_{tabel} 2,037, maka H_0 ditolak artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil *output* tersebut digambarkan dan telah disajikan pada gambar 4.7.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal. Hal tersebut dapat ditinjau dari nilai t_{hitung} untuk PAD sebesar 5,021 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2,037 (5,021> 2,037).

Berdasarkan analisis korelasi dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai hubungan yang cukup tinggi terhadap Belanja Modal. Dimana nilai koefisien korelasi untuk PAD adalah sebesar 0,686 atau dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup tinggi.

Nilai koefisien determinasi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal adalah sebesar 47%. Artinya PAD mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 47%. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Y. Sri Pudyatmoko (2009:67) bahwa Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hasil Pendapatan Asli Daerah masuk ke bagian Pendapatan Daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk Belanja Daerah, termasuk Belanja Modal. Jadi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi Belanja Modal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mangowal (2013), Oviliza (2013), Pelealu (2013), serta Wertianti dan Dwiranandra (2015) pun menyimpulkan hasil yang sama. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, maka Belanja Modal akan ikut meningkat.

4.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan Belanja Modal. Hal tersebut dapat ditinjau dari nilai t_{hitung} untuk SiLPA sebesar 4,625 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2,037 (4,625 > 2,037).

Berdasarkan analisis korelasi dapat diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mempunyai hubungan yang cukup tinggi terhadap Belanja Modal. Dimana nilai koefisien korelasi untuk SiLPA adalah sebesar 0,658 atau dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup tinggi.

Nilai koefisien determinasi untuk variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal adalah sebesar 43,2%. Artinya SiLPA mempunyai pengaruh terhadap

Belanja Modal sebesar 43,2%. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Abdul Hafidz Tanjung, (2014:91) bahwa kelebihan SiLPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan Belanja Modal.

Berdasarkan penelitian Andriani dan Yuliana (2016) yang menyimpulkan bahwa, ”kenaikan SiLPA sebesar satu satuan akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,51 miliar rupiah atau 510 juta rupiah”. Hal ini menunjukan bahwa tingginya SiLPA yang terdapat dalam periode anggaran yang bersangkutan akan meningkatkan Belanja Modal pada periode anggaran selanjutnya (Kusnandar, 2012). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013), Simamora (2014), serta Sugiarthi dan Supadmi (2014) bahwa peningkatan SiLPA, akan mempengaruhi peningkatan Belanja Modal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Jawa Barat periode 2011-2015, dimana setiap ada peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan meningkatkan Belanja Modal. Namun rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan oleh penerimaan pajak daerah, penjualan kekayaan alam daerah, retribusi daerah, dan laba usaha daerah (BUMD) yang rendah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun menurun. Hal tersebut berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dana yang tersedia untuk dialokasikan pada Belanja Modal pun kecil.

2) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Jawa Barat periode 2011-2015, dimana setiap kenaikan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) maka akan meningkatkan Belanja Modal. Namun terdapat beberapa aspek yang terdapat dalam pos Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurun. Selain itu SiLPA yang rendah mengindikasikan bahwa realisasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikatakan efektif. Namun realisasi belanja yang dimaksudkan tidak hanya untuk dialokasikan pada Belanja Modal. Melainkan semua pos belanja dalam APBD yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Sehingga Belanja Modal dapat mengalami penurunan walaupun pengalokasian anggaran untuk Belanja Daerah dapat dikatakan efektif.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota Jawa Barat periode 2011 - 2015 sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1) Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya menjadi semakin baik dan memaksimalkan potensi dari segala sumber penerimaan daerahnya masing-masing agar pendapatan yang diperoleh akan besar. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Belanja Modal akan meningkat.
2) Mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), diharapkan agar pemerintah lebih bijak dalam mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerahnya. Dan pengalokasian anggaran lebih ditekankan untuk Belanja Modal, mengingat Belanja Modal merupakan pengalokasian belanja untuk aset tetap yang dapat meningkatkan

prospek perekonomian daerah. Apabila nilai SiLPA terbilang cukup tinggi, diharapkan dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan Belanja Modal untuk periode anggaran selanjutnya.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Pengembang Ilmu
   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu Akuntansi Sektor Publik, serta berkontribusi dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Belanja Modal sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca khususnya dalam ilmu akuntansi sektor publik.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
   Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama tetapi dengan variabel, unit analis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang dapat diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafidz Tanjung. 2014. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.* Bandung: Alfabeta

Andreas M. Pelealu. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012.* Denpasar: Jurnal EMBA 1197 Vol.1 No.4

Aries Djaenuri. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Gahila Indonesia

Danang Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.

Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.

Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali.

Ida Mentayani dan Rusmanto. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan*. Banjarmasin: STIE Nasional Banjarmasin.

I. G. A. Gede Wertianti, A.A.N.B. Dwirandra. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan PAD Dan DAU Sebagai Variabel Moderasi.* Denpasar: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana

Imam *Ghozali*. *2013*. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. 21. Edisi 7*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

Indra Bastian. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.

Jessy C. Mangowal. 2013. *Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.* Aceh: Jurnal EMBA Vol.1 No.4

Kusnandar & Dodik Siswantoro. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.*

Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, *Cetakan Kedua*. Bandung: Refika Aditama.

Oviliza Haryuli, M.Rasuli, Devi Safirti. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, Dan Derajat*

Kontribusi BUMD Terhadap Alokasi Belanja Modal. Riau: Universitas Riau. ISSN : 2355-6854

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 – Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

_____. *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 – Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

_____. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 – Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta

Syukriy Abdullah, Wahyudin Albra. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.

Umi Narimawati. 2011. *Meteodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung:Agung Media

Y. Sri Pudyatmoko. 2014. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

LAMPIRAN

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (PAD) X1	"Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Halim dan Kusufi (2012:101)	1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah. + PAD Halim dan Kusufi (2012:101)	Rasio
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) X2	"Selisih Lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan". Abdul H. Tanjung (2014:91)	• SiLPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto • Surplus/Defisit = Jumlah Pendapatan – Jumlah Belanja dan Transfer • Pembiayaan Neto = Jumlah Penerimaan – Jumlah Pengeluaran Abdul H. Tanjung (2014:99)	Rasio
Belanja Modal Y	"Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntasi. Nilai asset belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan." Erlina dan Rasdianto (2013:121)	Belanja Modal = BM 1 + BM 2 + BM 3 + BM 4 + BM 5 Ket: BM 1 = Tanah BM 2 = Gedung dan Bangunan BM 3 = Peralatan dan Mesin BM 4 = Jalan, Irigasi dan Jaringan BM 5 = Fisik Lainnya Erlina dan Rasdianto (2013:121)	Rasio

Tabel 3.2

Daftar Kabupaten dan Kota yang Menjadi Sampel Penelitian

No.	Kabupaten dan Kota
1	Kab. Bogor
2	Kab. Cirebon
3	Kab. Majalengka
4	Kota Bandung
5	Kota Bekasi
6	Kota Cimahi
7	Kota Depok

Tabel 3.3

Tingkat Keeratan Korelasi

0 – 0,20	Sangat rendah (hampir tidak ada hubungan)
0,21 – 0,40	Korelasi yang lemah
0,41 – 0,60	Korelasi sedang
0,61 – 0,80	Cukup tinggi
0,81 – 1	Korelasi tinggi

Sumber: Husein Umar (2015:231)



Sumber: Sugiyono (2013:185)

Gambar 3.1

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Tabel 4.1
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters[a]	Mean	.0000264
	Std. Deviation	2.24388851E11
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.080
	Negative	-.113
Kolmogorov-Smirnov Z		.668
Asymp. Sig. (2-tailed)		.764

a. Test distribution is Normal.

Tabel 4.2
Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.895	1.117
	SILPA	.895	1.117

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.826[a]	.683	.663	2.313E11	1.393

a. Predictors: (Constant), SILPA, PAD

Tabel 4.4
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.311E11	6.749E10		1.943	.061
	PAD	.382	.076	.528	5.021	.000
	SILPA	.412	.089	.487	4.625	.000

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Tabel 4.5
Koefisien Korelasi Parsial

Correlations

		Belanja_Modal
PAD	Pearson Correlation	.686**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	35
SILPA	Pearson Correlation	.658**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	35

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.6
Koefisien Uji Hipotesis Pendapatan Asli daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.311E11	6.749E10		1.943	.061
	PAD	.382	.076	.528	5.021	.000
	SILPA	.412	.089	.487	4.625	.000

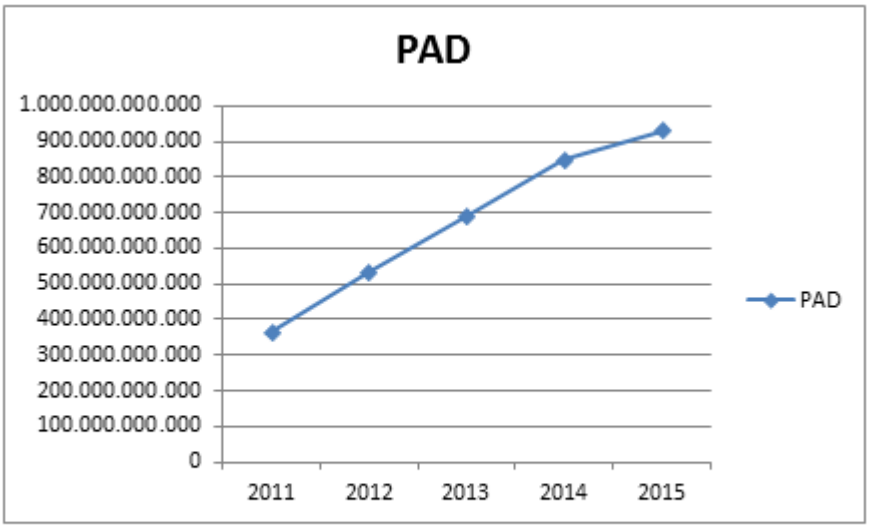
a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Tabel 4.7
Koefisien Uji Hipotesis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal

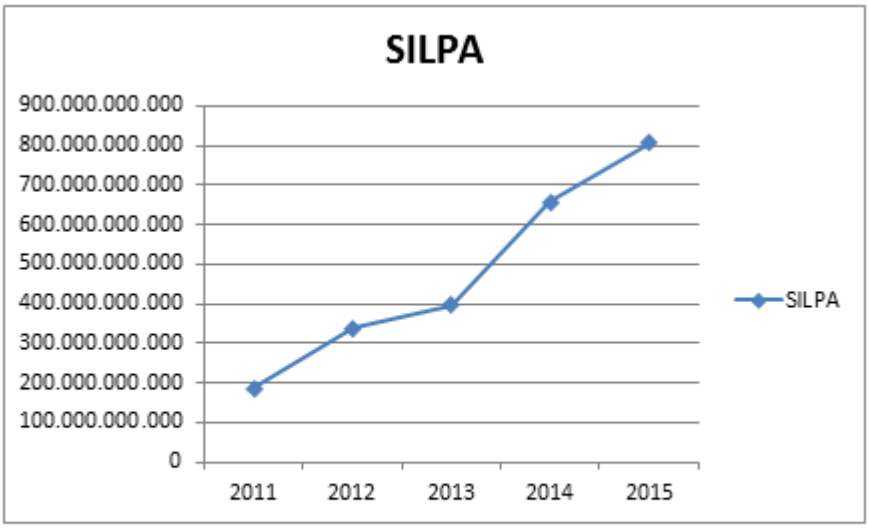
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.311E11	6.749E10		1.943	.061
	PAD	.382	.076	.528	5.021	.000
	SILPA	.412	.089	.487	4.625	.000

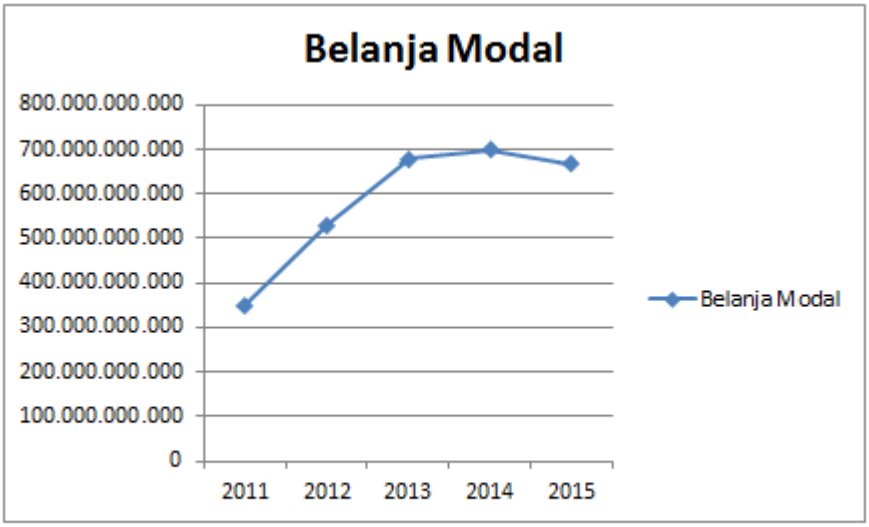
a. Dependent Variable: Belanja_Modal



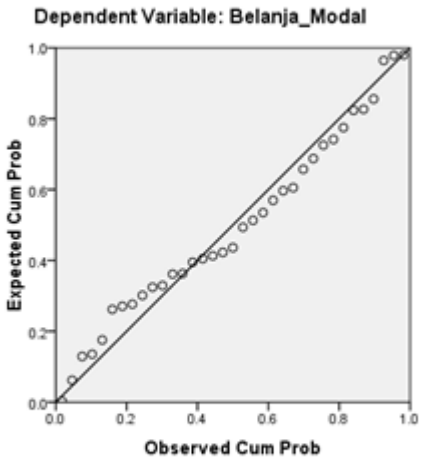
Gambar 4.1
Grafik Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten dan Kota Jawa Barat Periode 2011-2015



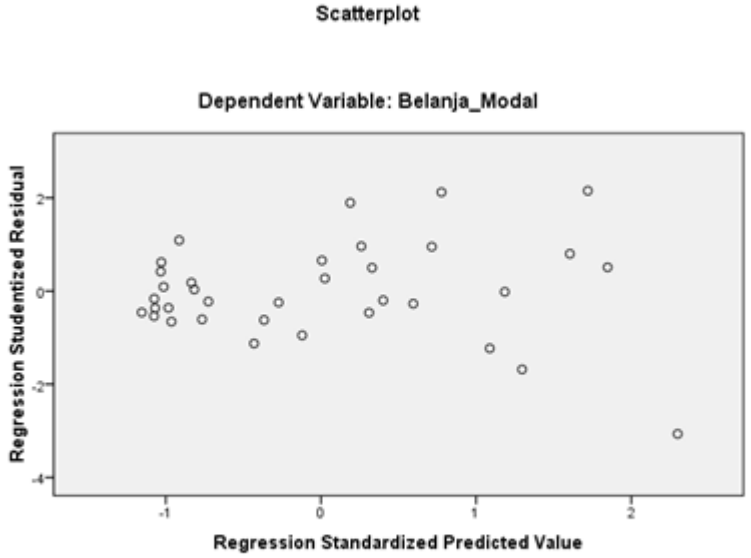
Gambar 4.2
Grafik Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Kabupaten dan Kota Jawa Barat Periode 2011-2015



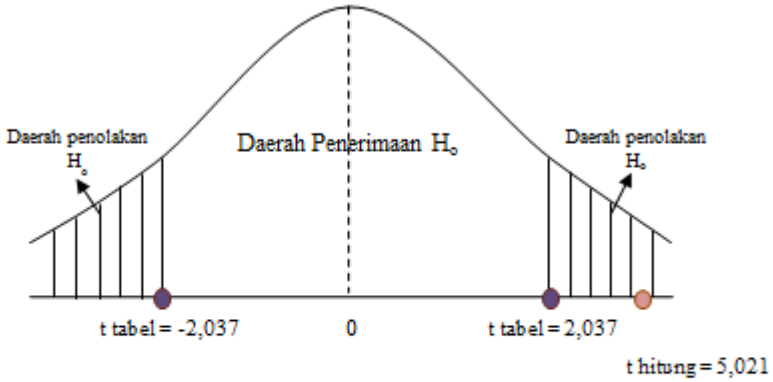
Gambar 4.3
Grafik Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Jawa Barat Periode 2011-2015



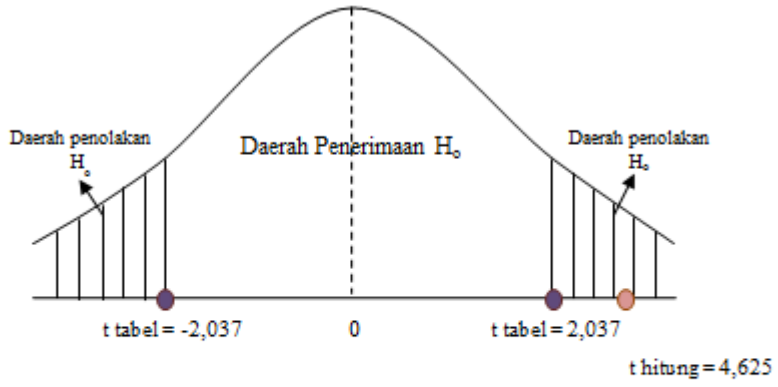
Gambar 4.4
P-Plot Uji Normalitas



Gambar 4.5
Grafik Scatterplots



Gambar 4.6
Grafik Uji Hipotesis Pendapatan Asli daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal



Gambar 4.7
Grafik Uji Hipotesis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal